

RENJA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2025 yang didanai dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Padang, 30 April 2025

**Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sumatera
Barat**



Drs. Maifrizon, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	25
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	35

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	66
3.2 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	70

BAB IV PENUTUP

4.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	83
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Efisiensi Pagu APBD Tahun 2025	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Realiasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025	8
Tabel 2-3 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel 2.4 Rekapitulasi Realisasi IKU s/d Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 2.5 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	35
Tabel. 2.7 Isu-Isu Strategis dalam Rangka Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	47
Tabel 2.8 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat	49
Tabel 2.9 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat	62
TABEL 3.1 T-C.33 RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan penjabaran Renstra 2021 -2026 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan perubahan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selain dari itu, penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD yang menjadi tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Proses Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah mempertimbangkan capaian evaluasi kinerja tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD tersebut adalah Rencana Kerja SKPD yang telah ditetapkan dan telah dipedomani RKPD yang telah ditetapkan nantinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

- 6 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 10 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan

RKPD;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI Nomor 8 sa Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
- 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- 18 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
- 19 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-510-2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- 20 Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : Nomor : 050/78/IV/P2EPD/BAPPEDA-2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

✓ MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu/periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perubahan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

✓ TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun yaitu tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : Nomor : 050/78/IV/P2EPD/BAPPEDA-2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan;

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025;

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah – kaidah pelaksanaan rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ;

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Efisiensi Pagu APBD Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERGESERAN I (Rp)	+/-	
				(Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	15.446.195.484	14.046.076.055	(1.400.119.429)	(9,06)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.814.010.548	3.107.121.750	(Rp1.706.888.798)	(54,93)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.672.584.959	24.097.233.474	(3.575.351.485)	(12,92)
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.100.000.000	2.000.000.000	(100.000.000)	(5)
JUMLAH PAGU RENJA		50.032.790.991	43.250.431.279	1.501.589.410	(12,08)

Sumber data: DPA Pergeseran I TA 2025

Efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pada Bulan Maret Tahun 2025 dalam bentuk APBD Pergeseran I Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 berdasarkan APBD Pergeseran I Tahun 2025, secara fisik telah direalisasikan sebesar 45,12% dan realisasi keuangan sebesar 30,48%. Realisasi keuangan yang belum sampai 50% di akhir triwulan II tetapi telah melebihi 40% pada semester I sesuai dengan arah kebijakan penganggaran pada tahun 2025 ini dimana 40% anggaran berada pada semester I dan 60% anggaran berada pada semester II aliran kasnya, beberapa faktor lain yang mempengaruhi realisasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan (aliran kas) yang semulanya direncanakan pada Triwulan II berpindah ke Triwulan III dan IV karena efisiensi anggaran dan penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi/pelaksanaan kegiatan, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berikut realisasi anggaran berdasarkan pagu APBD Pergeseran I Tahun 2025:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Realiasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU PERGESERAN I (Rp)	REALIASI (Rp)	SISA PAGU (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	14.046.076.055	6,905,541,197	7,140,534,858
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.107.121.750	806,924,232	2,300,197,518
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	24.097.233.474	4,669,318,059	19,427,915,415
4	PROGRAM PENGEMBANGAN	2.000.000.000	800,000,000	1,200,000,000

	KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
	JUMLAH PAGU RENJA	43.991.260.712	13,181,783,488	30,068,647,791

Sumber data: Laporan Simbangda

Tabel 2-3 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun lalu (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) (9/5*100%)			
				6		5		6		7				9			9		9					
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2025) yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025 Triwulan		K		RP		TW I		TW II			TW III		TW IV		K		RP	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		100	38.733.619.000	0	64.688.972.378	43.250.431.279	4.976.568.616	0	8.202.473.957	0	0	0	0	4.976.568.616	9,22	0,00	15,21	100	12,85%			
2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	18.390.734.000	0	14.511.756.027	100	14.046.076.055	2.790.291.366	4.111.758.916	0	0	0	0	4.976.568.616	9,22	0,00	15,21	100	27,06%			
2.19.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	1.555.000.000	0	246.004.339	85	221.307.568	0	26.456.800	0	57.075.950	0	0	0	0	26.456.800	0,00	2,27	0,00	2,27	100	1,70%
1	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	680.000.000	100	98.313.214	4	60.153.750	1	7.723.900	1	9.232.650	0	0	0	0	7.723.900	25,00	5,55	25,00	5,55	4	1,14%
2	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	295.000.000	3	12.277.000	3	14.843.075	1	1.221.000	1	1.661.500	0	0	0	0	1.221.000	100,00	0,75	100,00	0,75	3	0,41%
3	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	380.000.000	5	135.414.125	5	76.088.043	1	641.000	1	31.232.100	0	0	0	0	641.000	20,00	0,25	20,00	0,25	5	0,17%
4	2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	19	21.883.750	6	12.070.900	0	1.940.500	0	0	0	0	12.070.900	31,58	8,33	31,58	8,33	0	#DIV/0!
5	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usuran yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	1	48.338.950	1	4.800.000	0	13.009.200	0	0	0	0	4.800.000	100,00	2,26	100,00	2,26	0	#DIV/0!
6	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	

17	2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	0	0	1	7.320.700	1	3.619.075	0	0	0	23.136.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
18	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	15.000.000	1	29.582.100	1	28.285.200	0	0	0	1.418.100	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00%	
19	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	15.000.000	1	3.278.500	1	4.792.675	0	0	0	1.316.200	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00%	
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	180.000.000	100	156.378.000	100	46.026.000	0	0	0	24.705.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%	
20	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100	180.000.000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%	
21	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	15	156.378.000	15	46.026.000	0	0	0	24.705.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.573.065.000	0	1.191.071.358	100	382.280.900	0	87.176.350	0	124.727.338	0	0	0	87.176.350	0,00	6,55	0	87.176.350	100	5,54%
22	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	80.000.000	6	69.412.200	5	19.059.188	0	0	1	13.997.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	
23	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	80.000.000	1	16.598.001	7	4.153.629	0	0	2	4.153.629	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	0,00%	
24	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	27	0,00%	
25	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	150.000.000	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	0,00%	
26	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	0	0	0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
27	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	140.000.000	5	91.518.100	5	28.148.644	1	6.448.000	1	4.773.900	0	0	0	6.448.000	0,00	6,45	0	6.448.000	5	4,61%
28	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KBOR]		2	100.000.000	1	14.246.400	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	0,00%	
29	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	35.578.000	6	62.367.900	4	8.608.750	1	1.908.600	1	6.700.000	0	0	0	1.908.600	0,00	4,77	0	1.908.600	6	5,36%

30	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000.000	3	10.397.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00%		
31	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	211	25.000.000	211	12.780.000	12	5.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0,00%		
32	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KBOR]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	15.000.000	10	5.580.000	12	4.410.000	3	980.000	3	980.000	0	0	3	980.000	25,00	3,92	3	980.000	10	6,53%	
33	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani			50	21.495.000	10	4.705.000	3	1.976.000	2	797.000	0	0	1	1.976.000	10,00	40,57	1	1.976.000	0	#DIV/0!	
34	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	517.487.000	50	877.687.957	50	255.942.614	10	75.863.750	10	91.525.909	0	0	4	75.863.750	8,00	14,66	4	75.863.750	50	14,66%	
35	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola			0	8.988.800	1	1.890.575	0	0	0	1.799.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	812.669.000	-	35.432.000	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%	
36	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	2	232.669.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00%	
37	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	124	150.000.000	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	124	0,00%	
38	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Mebel	50	50.000.000	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	50	0,00%	
39	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5	180.000.000	0	35.432.000	5	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	
40	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru. (Contoh: Lift, AC Central)	100	200.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.700.000.000	-	2.404.529.853	100	2.619.278.989	0	168.637.522	0	762.445.069	0	0	0	0	168.637.522	0,00	7,82	0	168.637.522	100	6,25%
41	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800	30.000.000	100	28.444.850	1800	7.475.000	500	4.739.500	500	991.800	0	0	3	4.739.500	0,17	23,70	3	4.739.500	1800	15,80%	
42	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	20.000.000	0	5.000.000	500	2.500.000	18	2.500.000	0	0	0	18	2.500.000	3,60	16,67	18	2.500.000	500	12,50%		
43	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	650.000.000	48	166.765.829	48	156.807.000	12	39.097.429	0	32.249.022	0	0	12	39.097.429	25,00	12,99	12	39.097.429	48	6,01%	

30	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000.000	3	10.397.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	0,00%		
31	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	211	25.000.000	211	12.780.000	12	5.362.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	211	0,00%		
32	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KBOR]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	15.000.000	10	5.580.000	12	4.410.000	3	980.000	3	980.000	0	0	3	980.000	25,00	3,92	3	980.000	10	6,53%
33	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani			50	21.495.000	10	4.705.000	3	1.976.000	2	797.000	0	0	1	1.976.000	10,00	40,57	1	1.976.000	0	#DIV/0!
34	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	517.487.000	50	877.687.957	50	255.942.614	10	75.863.750	10	91.525.909	0	0	4	75.863.750	8,00	14,66	4	75.863.750	50	14,66%
35	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola			0	8.988.800	1	1.890.575	0	0	0	1.799.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	812.669.000	-	35.432.000	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%	
36	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	2	232.669.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00%
37	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	124	150.000.000	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	124	0,00%
38	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Mebel	50	50.000.000	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	50	0,00%
39	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5	180.000.000	0	35.432.000	5	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	5	0,00%
40	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru. (Contoh: Lift, AC Central)	100	200.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	100	0,00%
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.700.000.000	-	2.404.529.853	100	2.619.278.989	0	168.637.522	0	762.445.069	0	0	0	168.637.522	0,00	7,82	0	168.637.522	100	6,25%
41	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800	30.000.000	100	28.444.850	1800	7.475.000	500	4.739.500	500	991.800	0	0	3	4.739.500	0,17	23,70	3	4.739.500	1800	15,80%
42	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	20.000.000	0	5.000.000	500	2.500.000	18	2.500.000	0	0	0	18	2.500.000	3,60	16,67	18	2.500.000	500	12,50%	
43	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	650.000.000	48	166.765.829	48	156.807.000	12	39.097.429	0	32.249.022	0	0	12	39.097.429	25,00	12,99	12	39.097.429	48	6,01%

44	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	200.000.000	89	89.692.787	48	81.144.000	12	13.773.458	25.166.629	0	0	12	13.773.458	25,00	7,87	12	13.773.458	48	6,89%
45	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1.100.000.000	9	1.594.428.366	12	1.845.972.484	3	102.045.305	477.164.580	0	0	3	102.045.305	25,00	10,20	3	102.045.305	7	9,28%
46	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	700.000.000	11	520.198.021	12	525.380.505	3	6.481.830	226.873.038	0	0	3	6.481.830	25,00	1,00	3	6.481.830	11	0,93%
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		100	2.500.000.000	0	380.484.812	100	307.044.559	0	82.427.000	0	0	0	0	82.427.000	0,00	4,41	0	82.427.000	100	3,30%
47	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	2	52.632.912	1	28.095.000	0	12.023.250	0	0	0	12.023.250	0,00	23,12	0	12.023.250	0	#DIV/0!	
48	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	400.000.000	10	191.155.300	8	73.884.559	2	39.534.250	5.909.850	0	0	2	39.534.250	25,00	19,77	2	39.534.250	10	9,88%
49	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KBOR]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	2	0	0	0	23.176.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	#DIV/0!
50	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	50.000.000	50	16.000.000	50	4.375.000	12	4.375.000	0	0	0	12	4.375.000	24,00	17,50	12	4.375.000	50	8,75%
51	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	50.000.000	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	40	0,00%
52	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			99,99	97.736.600	100	50.090.000	24	26.494.500	9.194.000	0	0	24	26.494.500	24,00	29,35	24	26.494.500	0	#DIV/0!
53	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	500.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1	0,00%
54	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	500.000.000	0	0	30	127.400.000	7	0	0	0	0	7	0	23,33	0,00	7	0	100	0,00%
55	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	500.000.000	0	22.960.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	22	0,00%

56	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	500.000.000	30	0	22	0	5	0	0	0	0	0	5	0	22,73	0,00	5	0	2	0,00%
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	1890 orang	4.144.803.000	0	1.837.858.747	18	3.107.121.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1890 orang	0,00%
			Jumlah wirausaha muda baru	20%	0	348																	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	100	3.455.338.000	0	1.644.753.747	100	2.504.546.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%
58	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298	678.569.000	404	1.177.129.197	298	1.424.028.650	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	298	0,00%	
59	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		1	135.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	1	0,00%	
60	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5	100.000.000	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	
61	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1	91.639.000	1	3.300.000	1	18.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00%	
62	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda			0	0	0	122.775.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	#DIV/0!	
63	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15	200.000.000	15	74.089.550	15	168.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	15	0,00%	
64	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380	1.200.000.000	176	390.235.000	348	770.690.350	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	380	0,00%	

2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100	6.832.059.790	0	3.784.800.300	100	3.725.299.474	0	205.989.250	0	1.193.989.610	0	0	0	0	0	0	205.989.250	0,00	3,11	0	205.989.250	100	3,02%
73	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	400	200.000.000	0	0	200	577.211.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	400	0,00%
74	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga [UPTD KBOR]	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30	950.000.000	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	30	0,00%
75	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	25	340.744.000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25	0,00%
76	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7	200.000.000	0	941.818.600	7	260.150.000	0	0	140.518.095	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	7	0,00%
77	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4	50.000.000	0	0	4	13.923.400	0	0	12.108.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4	0,00%
78	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	30	300.000.000	0	0	20	0	0	0	19.209.015	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	30	0,00%
79	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119	4.791.315.790	77	2.842.981.700	119	2.874.014.250	77	205.989.250	1.022.154.500	0	0	77	205.989.250	64,71	4,30	77	205.989.250	119	4,30%			
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	950.948.000	0	36.046.656.800	100	18.330.416.375	0	1.980.288.000	0	1.099.933.520	0	0	0	0	0	0	1.980.288.000	0,00	12,70	0	1.980.288.000	100	208,24%
80	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan organisasi Keolahragaan di Provinsi	0	0	4	33.729.500.000	3	14.000.000.000	1	1.800.488.000	0	0	0	1	1.800.488.000	33,33	14,97	1	1.800.488.000	0	#DIV/0!			
81		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	3	0,00%	
82	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2	669.422.000	2	2.317.156.800	4	4.330.416.375	1	179.800.000	1.099.933.520	0	0	1	179.800.000	25,00	5,04	1	179.800.000	2	26,86%			

2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,64	1.238.677.000	0	2.075.000.000	5,44	2.000.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5,64	0,00%
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	1.238.677.000	-	2.075.000.000	100	2.000.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	100	0,00%
83	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	245.257.000	1	2.075.000.000	1	2.000.000.000	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00%
84	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1	400.000.000	0	0	1	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00%
85	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	80	81.798.000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	80	0,00%

Penjelasan Target dan Realisasi Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 sampai pada Triwulan II

Capaian setiap indikator kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dan tepat. Sehingga ketercapaian target dari setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada realisasi melalui indikator - indikator kinerja seperti pada tabel di atas. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Dalam pencapaian program melalui indikator kinerja ditemui beberapa permasalahan yang terjadi karena berbagai faktor, permasalahan program kegiatan diantaranya :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 9 (Sembilan) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja, sesuai dengan notulen rapat pembahasan verifikasi RKA tahun anggaran 2025 ada beberapa sub kegiatan penunjang urusan yang digabung atau dihilangkan. Pencapaian sampai pada triwulan II sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi terdapat beberapa kendala dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang memakai sistem e purchasing sehingga adanya pergeseran aliran kas dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dicapai melalui 2 (dua) kegiatan untuk pencapaian target kinerja, yaitu : kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan dengan 7 (enam) sub kegiatan dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan. Pada prinsipnya, kegiatan direncanakan terlaksana sesuai dengan agenda pelaksanaan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain adanya peserta pelatihan yang tidak berasal dari 19 kabupaten/kota yang telah ditetapkan, serta penganggaran pelaksanaan kegiatan yang terbagi sebesar 40% pada

semester I dan 60% pada semester II. Akibatnya, sebagian besar kegiatan, khususnya yang bukan termasuk urusan penunjang, belum dapat dilaksanakan hingga triwulan II dan baru bisa dilaksanakan pada triwulan III dan IV disebabkan adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan kembali.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program ini adalah :

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan, dicapai melalui :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi dengan target kinerja 298 orang serta realisasi keunagan sampai triwulan II masih 18,06% karena adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya menunggu pengesahan APBD Perubahan.
 - b) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi dengan target kinerja 0 orang dan realisasi sampai triwulan II masih 0 kegiatan tidak terlaksana disebabkan tidak adanya dukungan anggaran.
 - c) Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda target kinerja 5 orang dan realisasi sampai triwulan II masih 0 kegiatan tidak terlaksana disebabkan tidak adanya dukungan anggaran.
 - d) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi target kinerja 1 dokumen dan realisasi sampai triwulan II 0 dokumen serta pada APBD Perubahan kegiatan ini tidak memiliki dukungan anggaran lagi karena kebijakan efisiensi anggaran.
 - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi dengan target kinerja 100%

dan realisasi keuangan sampai triwulan II sudah 57,42% dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan kepemimpinan pemuda dari OKP dari masing masing daerah.

- f) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dengan target kinerja 15 orang dan realisasi sampai triwulan I masih 0 orang karena kegiatan belum dapat terlaksana.
- g) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi dengan target kinerja 348 orang dan realisasi keuangan sampai triwulan II masih 82,59%.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, dicapai melalui :

- a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi dengan target 1 organisasi dan realisasi keuangan sampai triwulan II 12,51% yang dimana bentuk dari kegiatan ini adalah pelatihan manajemen organisasi kepemudaan sehingga menguatkan tata Kelola organisasi tersebut.

C. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini dicapai melalui 4 (empat) kegiatan untuk pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus target 7 dokumen dengan realisasi 0 sampai dengan triwulan II dan anggaran kegiatan ini akan dipindahkan untuk pemenuhan sub kegiatan lainnya.
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi (UPTD KBOR) target 15 unit realisasi 0 karena terdampak efisiensi pemotongan anggaran pada triwulan I jadi sub kegiatan ini pagu anggarannya sudah tidak ada lagi.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, dengan sub kegiatan :
- a) Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dengan target 140 orang realisasi anggaran 4,28% sampai dengan triwulan II kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.
 - b) Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (UPTD KBOR) dengan target 150 orang serta realisasi masih 0 karena terdampak efisiensi pemotongan anggaran pada triwulan I jadi sub kegiatan ini pagu anggarannya sudah tidak ada lagi.
 - c) Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi target 4 dokumen penyelenggaraan serta realiasi masih 0 dokumen sampai dengan triwulan II dan karena pada masing masing kabupaten kota tidak tersedianya anggaran maka penganggaran kegiatan ini akan dipindahkan kepada sub kegiatan lainnya pada APBDP Tahun 2025 .
 - d) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi target 19 dokumen penyelenggaraan serta realiasi masih 2 dokumen sampai dengan triwulan II dengan realisasi keuangan sebesar 12,59%.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, dengan sub kegiatan :
- a) Seleksi Atlet Daerah dengan 200 Orang serta realiasi masih 0 dokumen sampai dengan triwulan II menunggu pelaksanaan kegiatan triwulan IV dengan realisasi keuangan 3,33%.
 - b) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) target 7 pelatihan dan realisasi 1 pelatihan, selanjutnya kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada triwulan IV.
 - c) Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi dengan target 4 dokumen sampai dengan triwulan II ini realiasi masih 2 dokumen dengan realiasasi keuangan 86,96%.

- d) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi target 119 orang dan realisasi 77 orang sampai dengan triwulan II ini dengan realisasi keuangan 42,73%.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan sub kegiatan :
- a) Pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi target 3 dokumen realisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II dengan realisasi keuangan 12,86%.
 - b) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait target 4 dokumen realisasi 1 dokumen sampai dengan triwulan II dengan realisasi keuangan 29,55%.

D. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini dicapai melalui 1 kegiatan untuk pencapaian target kinerja, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan 1 sub kegiatan yang bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program ini adalah :

- 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dicapai melalui :
 - a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi dengan target 1 laporan kegiatan dan telah teralisasi sebanyak 1 laporan dengan triwulan II dengan realisasi keuangan 40%.

Seluruh Program kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat triwulan II baru hanya mencapai 30,48% dari total anggaran dinas sebesar Rp. 43.250.431.279,- setelah anggaran efisiensi tahap I.

Faktor-faktor penghambat tercapainya target kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah :

- 1. Efisiensi anggaran pada tahap I mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

2. Ada pergeseran kebutuhan pencairan hibah pada organisasi olahraga yang sebelumnya ditetapkan pada triwulan I sehingga ini salah satu yang berpengaruh dalam pencapaian target kinerja.
3. Hampir seluruh pelaksanaan kegiatan pada dinas berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, sehingga terjadi pergeseran dalam penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan pada masing-masing cabang olahraga dan kegiatan kepemudaan.
4. Pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 baru dapat dimulai pada bulan Februari, Triwulan I, sehingga hal ini berdampak signifikan terhadap penetapan jadwal serta proses pengadaan barang dan jasa.
5. Terjadi perubahan regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dari yang semula menggunakan sistem pengadaan langsung menjadi e-purchasing, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan di wilayah tersebut. Struktur organisasi dan tata kerjanya telah diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan penyesuaian ini maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2025 menjadi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian

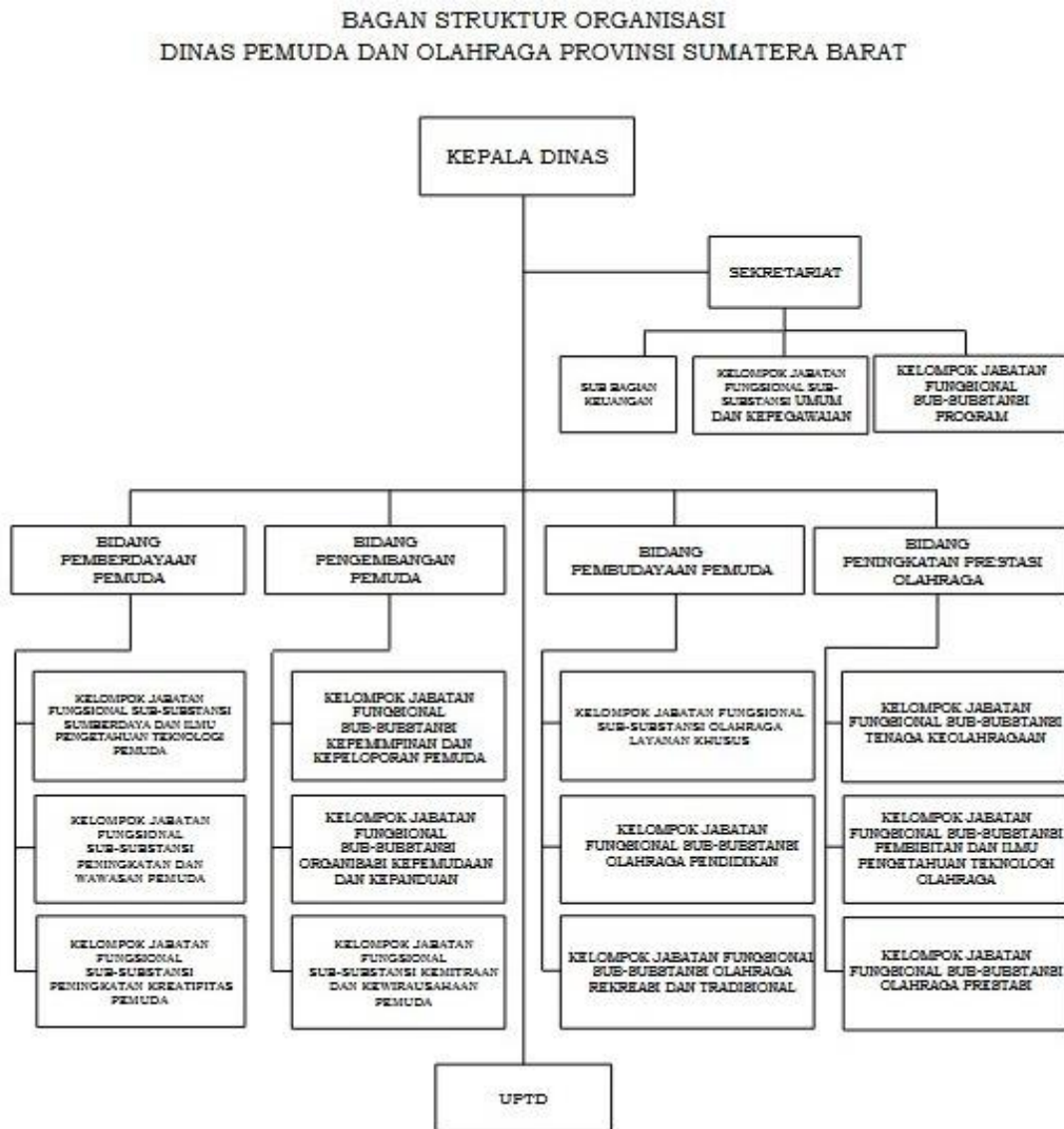
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang
 - b. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
- 4. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang
 - b. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
- 5. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang
 - b. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
- 6. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang
 - b. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
- 7. Kepala UPTD KBOR, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kasubag Tata Usaha
 - c. Kasi Pendidikan dan Latihan
 - d. Kasi Sarana dan Prasarana

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi adalah:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga; dan

- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang masing-masingnya mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Rekapitulasi Realisasi IKU s/d Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)

1	Meningkatnya Wirausaha Muda yg Mandiri	Jumlah Wirausaha Muda yang Mandiri	0,156	0	0	0
2	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	8,35	4	4	4
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Kebugaran	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaraan	20	5	5	5
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat di Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah medali emas pada event olahraga regional dan nasional	29	0	0	0

Sumber data: Laporan Realisasi Rencana Aksi TW I Dispora

Indikator Kinerja Pada Sasaran 1 sampai dengan 4 mengalami kenaikan target pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan Target Renstra Dinas tahun 2021-2026. Meningkatnya capaian target indikator kinerja wirausaha muda yang mandiri tidak terlepas dari mulai banyaknya pemuda yang berusaha membuka lapangan kerja secara mandiri dengan ini bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan penyerapan tenaga kerja bagi pemuda lainnya dan realisasi pada tahun 2024 2,54% dari jumlah pemuda. Kedua meningkatnya keterlibatan pemuda dalam berorganisasi baik itu organisasi kepemudaan maupun social kemasyarakatan terbukti pada tahun 2024 sebesar 10,37% dari total jumlah pemuda sumatera barat. Ketiga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga ini menunjuka mulai tinggi nya angka kesedaran masyarakat sumatera barat terhadap pentingnya kualitas Kesehatan terbukti pada tahun 2024 sebesar

20% dari total penduduk Sumatera Barat sudah terlibat dalam aktivitas kebugaran. Keempat terjadinya penurunan target dalam pencapaian indikator kinerja perolehan medali tingkat nasional maupun regional dari 41 medali emas menjadi 29 medali hal ini disebabkan menurunnya event tingkat nasional pasca PON dan PEPARNAS 2024.

Tabel 2.5 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat

	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW-I	Tahun 2025 TW-II	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)			0,104	0,13	0,156	0,182	0,104	0,13	0	0		0
2	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)			5,16	5,39	5,62	5,85	4,36	8,35	0	0		0
3	c. Peningkatan prestasi olahraga (medali)			26	41	29	29	63	135	0	0		0
4	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)			16	17	18	20	84,88	62,42	0	0		0
5	Jumlah wirausaha muda baru (orang)			348	348	348	348	490	176	0	0		0
6	Jumlah medali emas dalam event nasional (medali)			26	41	29	29	63	36	0	0		0
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan (%)			0,9	0,95	1	1,05	14	20	0	0		0
8	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan (%)			5,04	5,24	5,44	5,64	97,93	131,19	0	0		0
9	1. Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)												
10	a. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)			528	528	528	528	882	344	0	0		

Dengan adanya Target Indikator Kinerja poin 1 sampai dengan 10 ini merupakan arah tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Indikator Kinerja yang berpengaruh dalam peningkatan serta pengembangan pemuda dan keolahragaan, target indikator kinerja nomor 1 sampai dengan 10 merupakan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan sehingga setiap program kegiatan yang dijalankan selaras dengan arah kebijakan tersebut. Hasil pembangunan, berupa *outcome* dan *benefit*, juga dapat diukur tingkat akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, diharapkan hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sumatera Barat.

Salah satu poin penting dari keterkaitan Indikator Kinerja ini adalah lahirnya pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing, sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan mengambil peran aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Pemuda-pemuda tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Hal yang sama berlaku bagi terbentuknya atlet pelajar dan atlet senior berprestasi, yang hingga saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembinaan olahraga di Sumatera Barat. Kehadiran atlet-atlet pelajar berprestasi ini mencerminkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga, yang diawali dari program pembibitan atau *talent scouting*, termasuk bagi atlet penyandang disabilitas, guna meraih prestasi di bidang olahraga.

Penetapan target Indikator Kinerja tersebut mengharuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dirancang secara terukur dan terarah, agar mampu mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga

dalam mengimplementasikan seluruh rencana pembangunan yang telah disusun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dispora Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif, berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.	Keterbatasan program tindak-lanjut bagi pemberdayaan dan pengembangan pemuda terampil	Belum optimalnya Program tindak lanjut pemuda terampil	Peningkatan program kegiatan yang berkelanjutan
		Masih rendahnya kesadaran pemuda	Kurangnya program pembinaan kesadaran pemuda	Meningkatkan program pembinaan kesadaran pemuda
		Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan	Kurangnya program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan	Meningkatkan program kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan
		Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda	Kurangnya program kegiatan penyadaran	Meningkatkan program kegiatan penyadaran kepemudaan yang

			kepemudaan yang berkelanjutan	berkelanjutan
		Terbatasnya kesadaran tentang legalisasi organisasi	Kurangnya kegiatan sosialisasi atas manfaat legalisasi organisasi	Meningkatkan kegiatan sosialisasi atas manfaat legalisasi organisasi
		Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan	Kurangnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kegiatan penguatan organisasi kepemudaan
		Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	Kurangnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan
		Terbatasnya kegiatan pengembangan pemuda	Kurangnya kegiatan pengembangan kepemudaan yang berkelanjutan	Meningkatkan kegiatan pengembangan kepemudaan yang berkelanjutan
		Terbatasnya pembimbingan dan pendampingan terhadap alumni program kewirausahaan pemuda	Kurangnya program pembimbingan dan pendampingan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan	Meningkatkan program pembimbingan dan pendampingan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan
		Terbatasnya program peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota	Kurangnya program terhadap peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM Kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota	Meningkatkan program terhadap peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM Kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota

2.	Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, serta industri olahraga yang maju, dan mewujudkan prestasi serta daya saing olahraga di tingkat dunia	Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.	Minimnya sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga.
		Terbatas kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi	Minimnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi	Meningkatnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi
		Terbatasnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan	Minimnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan	Meningkatnya pelatihan peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan
		Terbatasnya pembinaan sentra/klub keolahragaan tingkat provinsi.	Minimnya pembinaan sentra/klub keolahragaan tingkat provinsi.	Meningkatnya pembinaan sentra/klub keolahragaan tingkat provinsi
		Terbatasnya teknologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit	Tidakadanya teknologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit	Meningkatnya teknologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit
		Terbatasnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sain Keolahragaan	Minimnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sain Keolahragaan	Meningkatnya IPTEK dan Riset terhadap pengembangan Sain Keolahragaan
		Terbatasnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan	Minimnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan	Meningkatnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan
		Terbatasnya komepetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional	Terbatasnya komepetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional	Meningkatnya komepetisi yang di ikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional

			dan nasional	
3.	Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.	Kualitas SDM yang tidak merata dalam organisasi dinas	Masih Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sehingga kecendrungan pegawai enggan untuk mengembangkan kemampuan diri	Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan maupun bimtek peningkatan kapasitas pegawai terkait dengan tupoksi kedinasaan maupun jabatan
		Maish lemahnya sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Masih minimnya evaluasi rutin terhadap tupoksi yang dijalankan	Meningkatnya Penerapan e-government dan sistem manajemen kinerja (misalnya e-SAKIP, e-Monev)
		Masih minimnya digitalisasi dan integrasi data dalam pelaksanaan pekerjaan	Masih minimnya kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem digital, aplikasi manajemen data, dan analitik	Meningkatnya penerapan SPBE (system pemerintah berbasis elektroik) dan penignkatan kualitas pegawai terampil teknologi
		Masih kurangnya partisipasi public dan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan program, evaluasi, dan penggunaan anggaran	Masih Banyak proses perencanaan dan evaluasi dilakukan secara top-down tanpa membuka ruang dialog publik yang efektif. Forum partisipatif sering hanya formalitas, dan informasi anggaran tidak mudah diakses atau dipahami publik	Meningkatnya pengaplikasian Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), sistem e-government seperti SIPD, serta arahan reformasi birokrasi mendorong instansi untuk lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap publik
		Fleksibilitas penggunaan anggaran APBD maupun APBN yang terbatas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi	Penerapan Struktur APBN/APBD diatur secara ketat melalui peraturan seperti Permendagri tentang pedoman	Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk menerapkan Performance-Based Budgeting (PBB), Money Follows Program, dan Sistem Informasi Pemerintahan

			penyusunan APBD, di mana belanja kegiatan harus sesuai dengan kodefikasi program nasional dan output tertentu. Hal ini membuat instansi sulit menyesuaikan anggaran secara dinamis untuk kebutuhan yang aktual dan mendesak	Daerah (SIPD) menjadi peluang untuk mendorong efisiensi dan alokasi anggaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil tupoksi.
--	--	--	---	--

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

✓ Masalah Kepemudaan

Disamping potensi vital yang dimiliki, juga terdapat beberapa permasalahan kepemudaan Sumatera Barat antara lain, belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencapaian layanan kepemudaan. Keberlanjutan Program Forum Anak yang merupakan jembatan komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak seharusnya juga dibarengi dengan terbentuknya Forum Pemuda yang masif sehingga anak-anak yang sudah menginjak remaja tetap memiliki wadah untuk mendapatkan akses interaksi dengan pemerintah. Selain itu belum optimalnya usaha pencegahan pemuda yang berperilaku menyimpang dan berisiko menyebabkan munculnya permasalahan yang dilakukan oleh pemuda di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemuda yang berperilaku menyimpang serta minimnya kontribusi pemuda terhadap kegiatan strategis juga dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi jejaring lembaga non pemerintah dalam pembangunan kepemudaan, sehingga akses

informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan pemuda tidak tersebar secara merata di Kabupaten/ Kota. Pemuda pada dasarnya memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengentasan isu- isu nasional seperti kemiskinan, permasalahan sosial dan ekonomi, jika pemuda tersebut bersedia, diberikan kesempatan menjadi agen perubahan dan memiliki wadah untuk mengembangkannya.

✓ **Masalah Keolahragaan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran karena kesadaran akan hidup sehat masih tergolong rendah. Sarana dan prasarana olahraga di ruang terbuka masih terbatas, sehingga masyarakat berpikir ulang untuk berolahraga dikarenakan memerlukan biaya. Disamping itu, berkaitan dengan prestasi olahraga Provinsi Sumatera Barat baik di tingkat Regional maupun Nasional masih tergolong belum optimal. Pengidentifikasian bakat atlit sejak dini perlu lebih optimal dilakukan oleh pengurus provinsi maupun pengurus cabang setiap cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui organisasi olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Barat, National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Sumatera Barat dan Special Olympics Indonesia (SOIna) Sumatera Barat. Sarana prasarana olahraga yang dimiliki pemerintah provinsi juga masih jauh dari layak, sehingga atlit yang dibina hanya memanfaatkan sarana dan prasarana seadanya. Selain itu perlu dilakukan penambahan sentra atau klub olahraga unggulan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga keolahragaan dan

peningkatan mutu kompetisi olahraga yang dimulai dari lingkup paling rendah yaitu desa/ kelurahan hingga tingkat provinsi.

Dengan demikian, tenaga keolahragaan, olahragawan, serta organisasi olahraga di Indonesia harus dapat menciptakan pola-pola pembinaan prestasi yang menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern serta standarisasi komponen-komponen pendukung pada pembinaan prestasi olahraga. Di dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern, Sumatera Barat tertinggal dari daerah – daerah lain seperti Jawa Timur. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil prestasi olahragawan Sumbar dalam berbagai event Regional, Nasional, dan Internasional belum memperlihatkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan, meskipun tidak bisa dikatakan terpuruk;

Kurangnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan di tingkat Regional, Nasional dan Internasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dari olahragawan kita dibandingkan dengan Daerah lainnya yang memiliki pendanaan yang terarah dan cukup;

Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, yang meliputi antara lain kurangnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya system manajemen keolahragaan Daerah.

Dengan demikian, tantangan kedepan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan

sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi system manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti *MDGs (Millenium Development Goals)*

- Melaksanakan urusan Kepemudaan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
- Melaksanakan urusan keolahragaan melalui Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
- Standar Pelayanan Minimal pada Dispora dengan telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

✓ *Pembangunan Kepemudaan*

Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia seringkali terkait dengan fakta, bahwa prestasi pembangunan manusia Sumatera Barat yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah membaik dengan realisasi 76.43%, dimana Indonesia memiliki IPM 75.02%. Sementara itu untuk tingkat Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berada di angka 55,67% tahun 2023. Pembangunan sumber daya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat strategis dalam pembangunan Nasional. Pemuda merupakan aset ekonomi yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauhmana kualitasnya.

Dengan demikian, pemuda dalam kategori ekonomi (*economic category*) memiliki potensi kekuatan besar yang tampak dengan jelas dalam pembangunan perekonomian daerah. Bahkan di beberapa negara maju yang memiliki struktur penduduk piramida terbalik, dimana jumlah pemudanya lebih kecil dibandingkan usia tua menimbulkan kekhawatiran karena semakin besar rasio ketergantungan yang harus dipikul oleh usia produktif. Dengan demikian, posisi pemuda tidak hanya semata-mata sumberdaya produksi bagi kegiatan perekonomian sebagai tenaga kerja, tetapi juga merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu daerah.

Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan yang dimiliki oleh golongan usia ini. Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional pada era-era perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankannya di awal-awal

kemerdekaan, sebagian besar tokohnya adalah kaum muda. Era kepemimpinan dan ketokohan pemuda dalam gerakan sosial dan politik di Indonesia era '98 juga dipelopori oleh para pemuda. Dengan demikian, pemuda dalam kategori sosial memainkan peran kepeloporan yang relatif signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial-keswadayaan sebagai *social workers*, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi kreatif, serta kegiatan olahraga. Potensi pemuda lain yang dapat menjadi kebanggaan bangsa adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pemuda dalam bidang iptek dapat diwujudkan dalam kepeloporan penemuan dan pemanfaatan Iptek. Kepeloporan Iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Melalui kepeloporan Iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaru dan pelopor kemajuan peradaban manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam penguasaan Iptek di masa depan akan menjadi salah satu penentu keunggulan bersaing dalam percaturan negara di dunia, disamping kekuatan ekonomi dan militer.

✓ **Pembangunan Keolahragaan**

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemasalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan

pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan daerah sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Fokus pembangunan keolahragaan pada kurun waktu tahun 2021 – 2026 adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan pondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat dari berbagai daerah di Sumatera Barat sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah.

Penciptaan sumber daya manusia untuk membentuk calon olahragawan berbakat dilakukan melalui penancangan gerakan nasional (secara massal) guna menjadikan olahraga sebagai gaya hidup (life style); pemberdayaan (revitalisasi) olahraga dasar seperti lari, loncat dan lempar (track and field) disatuan-satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi; serta fasilitasi penyelenggaraan perlombaan/ kompetisi olahraga antar satuan pendidikan dan fasilitasi penyediaan instruktur/ pelatih/ guru olahraga yang berkualitas Internasional di tengah-tengah masyarakat.

Potensi utama yang diharapkan dapat menonjol adalah komitmen penuh pemerintah dan DPRD dalam mendukung program keolahragaan terutama dalam segi penganggaran yang diaplikasikan dengan meningkatnya alokasi anggaran keolahragaan dari tahun ke tahun,

termasuk juga memotivasi dunia usaha untuk memberikan dana melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari industri nasional dan BUMN / BUMD dalam mendukung pengembangan kegiatan olahraga di masyarakat.

Peningkatan prestasi olahraga daerah didukung oleh potensi pengembangan cabang olahraga unggulan (Renang, Tinju, Pencak Silat, Kempo, Karate, Tarung Derajat, Bowling, Sepaktakraw, Gulat, Taekwondo, dan Angkat Berat) dengan pemanfaatan IPTEK olahraga modern dan manajemen pembinaan terpadu oleh Pemerintah, Komite Olahraga Nasional, Induk Organisasi cabang olahraga yang memperoleh dukungan anggaran melalui APBD dan APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Program untuk sentra-sentra keolahragaan yang telah dimulai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat akan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada saat ini ; pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) dan pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM); Klub olahraga sekolah/ pelajar, Klub olahraga masyarakat, Klub-Klub olahraga dibawah binaan Induk Organisasi Cabang Olahraga (Pengprov); serta potensi olahragawan berprestasi di lingkungan TNI/POLRI.

2.3.5 Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Tabel. 2.7
Isu-Isu Strategis dalam Rangka Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

PERMASALAHAN 2016-2021	ISU STRATEGIS 2021-2026	TUJUAN 2021-2026
1. Belum optimalnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan karena kurang koordinasi lintas sektor dalam pencapaian layanan kepemudaan	Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang merubah pola pikir pemuda	Meningkatnya daya saing pemuda
2. Belum optimalnya usaha pencegahan pemuda yang berperilaku menyimpang dan beresiko.	Perbedaan karakteristik generasi	Meningkatnya daya saing pemuda
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran karena kurangnya kesadaran dan terbatasnya sarana olahraga ruang terbuka di lingkungan terdekat	Revitalisasi gerakan keperamukaan sesuai dengan perkembangan zaman	Meningkatnya kebugaran masyarakat
4. Belum optimalnya prestasi olahraga tingkat regional dan nasional karena belum teridentifikasi secara dini kebakatan atlit dan pemanfaatan teknologi olahraga serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran pada masa pandemic covid-19	
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi jejaring lembaga non pemerintah dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Identifikasi kebakatan atlit secara dini, penambahan sentra atau klub olahraga unggulan dan strategis, peningkatan SDM tenaga keolahragaan, kompetisi olahraga serta pembangunan sarana dan olahraga	
6. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran urusan pemuda dan olahraga belum melibatkan partisipasi publik	Tingginya peran serta orang tua dalam meningkatkan prestasi awal anak dalam berolahraga	

PERMASALAHAN 2016-2021	ISU STRATEGIS 2021-2026	TUJUAN 2021-2026
	Keberlanjutan Program Forum Anak yang ada pada kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dibarengi dengan terciptanya Forum Pemuda yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Forum pemuda yang belum teridentifikasi dan dikelola dengan baik	
	Rata-rata lama sekolah Sumatera Barat 8,96 tahun	
	Bonus demografi Sumatera Barat	

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan

- a. Dalam RKPD Perubahan tahun 2025 ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 50.032.790.991,- setelah dilaksanakan analisis kebutuhan tetap Rp. 43.250.431.279,1,-
- b. APBD 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Hasil analisis kebutuhan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Pada pergeseran tahap I terjadi efisiensi anggaran dispora sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dimana Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dengan menekankan efisiensi dan efektivitas dalam belanja pemerintah

daerah yang ada untuk pelaksanaan program kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

APBD 2025 Pergeseran Efisiensi Tahap I, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8 T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		15.446.195.484,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		14.046.076.055,00	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		472.827.185,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		221.307.568,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	132.466.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	60.153.750,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	32.206.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	14.843.075,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	153.446.085,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	76.088.043,00	
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah		Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	49.490.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	21.883.750,00	

5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	105.218.800,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	48.338.950,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan		10.088.192.304,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan		10.287.565.189,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 orang	9.534.992.304,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 orang	9.837.026.564,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	361.200.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	357.637.500,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	192.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	92.901.125,00	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		119.124.600,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		70.875.900	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	47.330.200,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	37.791.300,00	
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.541.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.177.750,00	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	53.253.400,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	24.906.850,00	

IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		67.397.200	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		36.696.950,00	
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	9.901.300,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	3.619.075,00	
2	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	44.975.200,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	28.285.200,00	
3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	12.520.700,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	4.792.675,00	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		165.877.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		46.026.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Stel Paket	60.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Stel Paket	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	105.877.000,00	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	15 Orang	46.026.000,00	
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		972.323.368	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		382.280.900	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	62.236.750,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19.059.188,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.048.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	76.403.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	83.249.575,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.148.644,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.435.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.608.750,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.150.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.362.500,00
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		11.020.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.705.000,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	512.860.228,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 dokumen	255.942.614,00
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Arsip Dokumen	7.562.300,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Arsip Dokumen	1.890.575,00
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	202.502.720,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	75.000.000,00
11	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Paket	10.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Paket	-
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		132.952.720,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		75.000.000,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		45.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000,00

VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		202.502.720,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		75.000.000	
1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 paket	10.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	124 paket	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5 unit	132.952.720,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5 Unit	75.000.000,00	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	1 unit	0	
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.774.036.989,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.619.278.989,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 laporan	19.300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 laporan	7.475.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	203.832.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	156.807.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.890.072.484,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.845.972.484,00	
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		583.914.118,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		583.914.118,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.690.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.095.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	142.444.118,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	73.884.559,00	

3	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	583.914.118,00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	307.044.559,00
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.180.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.090.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	127.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	127.400.000,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	18% 348 orang	4.814.010.548,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	18% 348 orang	3.107.121.750,00
I	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			100 %	4.014.010.548	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			100 %	2.504.546.000,00
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298 Orang	2.050.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298 Orang	1.424.028.650,00
2	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	414.010.548,00	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	18.745.000,00

3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	122.775.000,00	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	200.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	168.307.000,00	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	348 Orang	1.200.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	348 Orang	770.690.350,00	
II Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					800.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				602.575.750,00	
1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	2 Organisasi	800.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi	602.575.750,00	

C	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah medali emas dalam event nasional		27.672.584.959,00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah medali emas dalam event nasional		24.097.233.474,10
I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1.126.931.050,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		133.211.500,00
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	7 dokumen	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	7 dokumen	133.211.500
II	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		4.635.703.331,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		1.908.306.125,00
1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	122 Orang	1.105.752.000,00	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	122 Orang	284.072.500,00
2	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	4 Kegiatan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	4 Kegiatan	218.456.875,00
3	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	19 Kegiatan	1.950.000.000,00	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	19 Kegiatan	1.405.776.750,00
III	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		3.415.217.478,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		3.725.299.474,10
1	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	100.000.000,00	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	200 orang	577.211.824,10

2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 pelatda	300.000.000,00	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 pelatda	260.150.000,00	
3	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen	13.923.400,00	
IV	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		18.494.733.100,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		25.330.416.375,00	
1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 dokumen	4.494.733.100,00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 dokumen	4.330.416.375,00	
2	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	14.000.000.000,00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	21.000.000.000,00	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan		2.100.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan		3.000.000.000,00	
I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.100.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		3.000.000.000,00	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	2.000.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	3.000.000.000,00	
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 unit	100.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 unit	-	

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD KBOR											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		15.446.195.484,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		14.046.076.055,00	
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		972.323.368,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		382.280.900,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	16.614.515,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	4.153.629,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	93.920.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	14.938.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.005.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.880.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.410.000,00	
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		202.502.720,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		75.000.000,00	
1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket mebel yang disediakan	42 paket	24.540.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 paket	-	
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.774.036.989,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.619.278.989,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	8.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	2.500.000,00	

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	126.252.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	81.144.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 laporan	526.580.505,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	525.380.505,00	
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		583.914.118,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		307.044.559,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	43.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	23.200.000,00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 unit	99.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah medali emas dalam event nasional		27.672.584.959,00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Jumlah medali emas dalam event nasional		31.097.233.474,10	
I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1.126.931.050,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		133.211.500,00	

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 unit	826.931.050,00	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 unit	-	
II	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		4.635.703.331,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		1.908.306.125,00	
1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	50 orang	1.279.951.331,00	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	50 orang	-	
III	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	3.415.217.478,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	3.725.299.474,10	
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah atlet berprestasi provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan	119 orang	2.965.217.478,00	Pembinaan dan Pengembangan olahragawan berprestasi provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119 orang	2.874.014.250,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan.
- b. Bidang-bidang mengusulkan program kegiatan masing-masing berdasarkan analisis kebutuhan Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cara menyerahkan usulan program kegiatan ke Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang nantinya akan dirangkum dalam Renja OPD.

Berikut disajikan dalam table :

Tabel 2.9 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
I	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
2	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Sumatera Barat	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		

5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
II	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				
1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		
B	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Sumatera Barat	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan		
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas		
C	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		

2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi (UPTD KBOR)	Sumatera Barat	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		
II Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					
1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Sumatera Barat	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
2	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (UPTD KBOR)	Sumatera Barat	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
3	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
4	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		
III Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					
1	Seleksi Atlet Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Sumatera Barat	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Sumatera Barat	Jumlah atlet berprestasi provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan		
4	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Sumatera Barat	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		

IV	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
2	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Sumatera Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa untuk Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja serta alokasi pagu indikatif yang telah diformulasikan.

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
01.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.19.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
	2.19.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.12.01.1.02.0003 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	2.19.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
	2.19.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah
	2.19.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya
	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	

Tingkat Nasional	
	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah
	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
	2.19.04.1.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
01.01 UPTD KBOR	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

3.2 Indikator Kinerja Tahun 2025

Berikut indikator kinerja yang akan direalisasikan pada tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat:

1. Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Wirausaha Muda yg Mandiri	Jumlah Wirausaha Muda yang Mandiri	0,156
2	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	8,35
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Kebugaran	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam melakukan aktifitas kebugaraan	20
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat di	Jumlah medali emas pada event olahraga regional dan nasional	29

	Tingkat Regional dan Nasional		
--	-------------------------------	--	--

2. Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,156%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	10,6%
3	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	15 Medali

TABEL 3.1 T-C.33
RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target 2025		APBD Pergeseran Tahap I	RKPD Perubahan		(Bertambah/ Berkurang)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah						
(1)	(2)	(3)	(4)					(9)	(10)		
2.19.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					43.250.431.279,10	51.250.431.279,10	8.000.000.000,00		38.733.619.000	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	100%	14.046.076.055,00	14.046.076.055,00	0,00		18.390.734.000,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	85%	221.307.568,00	221.307.568,00	0,00		472.827.185,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Sumatera Barat	4 dokumen	4 dokumen	60.153.750,00	60.153.750,00	0,00		4 dokumen 132.466.000,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Sumatera Barat	3 Laporan	3 Laporan	14.843.075,00	14.843.075,00	0,00		3 Laporan 32.206.300,00	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Barat	5 laporan	5 laporan	76.088.043,00	76.088.043,00	0,00		5 laporan 153.446.085,00	
2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sumatera Barat	19 Data	19 Data	21.883.750,00	21.883.750,00	0,00		19 Data 49.490.000,00	

2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Barat	0 Berita Acara	0 Berita Acara	48.338.950,00	48.338.950,00	0,00		1 Berita Acara	105.218.800,00
2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sumatera Barat	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00		0 Dokumen	0,00
2.19.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sumatera Barat	1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	0,00	0,00		1 Berita Acara	0,00
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	100%	10.287.565.189,00	10.287.565.189,00	0,00			10.138.192.304,00
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		93 orang	93 orang	9.837.026.564,00	9.837.026.564,00	0,00		71 orang	9.534.992.304,00
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	357.637.500,00	357.637.500,00	0,00		12 Dokumen	361.200.000,00
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00		5 Laporan	50.000.000,00
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	92.901.125,00	92.901.125,00	0,00		5 Laporan	192.000.000,00

2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	100%	70.875.900	70.875.900	0,00			119.124.600,00
2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 dokumen	3 dokumen	37.791.300,00	37.791.300,00	0,00		3 Dokumen	47.330.200,00
2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	8.177.750,00	8.177.750,00	0,00		1 Laporan	18.541.000,00
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 laporan	3 laporan	24.906.850,00	24.906.850,00	0,00		3 laporan	53.253.400,00
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		100%	100%	36.696.950,00	36.696.950,00	0,00			67.397.200,00
2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 laporan	1 laporan	3.619.075,00	3.619.075,00	0,00		1 laporan	9.901.300,00
2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		1 laporan	1 laporan	28.285.200,00	28.285.200,00	0,00		1 laporan	44.975.200,00
2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	1 Laporan	4.792.675,00	4.792.675,00	0,00		1 Laporan	12.520.700,00
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	46.026.000	46.026.000	0,00			165.877.000
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100 Stel Paket	0 Stel Paket	-	-	0,00		100 Stel Paket	60.000.000,00
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	15 Orang	46.026.000,00	46.026.000,00	0,00		15 Orang	105.877.000,00
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	382.280.900	382.280.900	0,00			830.965.453,00
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 paket	5 paket	19.059.188,00	19.059.188,00	0,00		5 paket	62.236.750,00
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD KBOR)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	4 paket	4.153.629,00	4.153.629,00	0,00			

2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0 Paket	-	-	0,00		1 Paket	36.048.600,00
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KBOR)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 paket	0 paket	-	-	0,00			
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		5 Paket	76.403.000,00
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	28.148.644,00	28.148.644,00	0,00			
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD KBOR)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00			
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	8.608.750,00	8.608.750,00	0,00		4 Paket	34.435.000,00
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD KBOR)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00			
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	5.362.500,00	5.362.500,00	0,00		12 Dokumen	7.150.000,00
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD KBOR)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00			
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Orang Laporan	10 Orang Laporan	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00		10 Laporan	11.020.000,00
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	50 laporan	255.942.614,00	255.942.614,00	0,00		50 laporan	512.860.228,00
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Arsip Dokumen	1 Arsip Dokumen	1.890.575,00	1.890.575,00	0,00		1 Arsip Dokumen	7.562.300,00
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			777.952.720,00
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	0,00		2 Unit	100.000.000,00

2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	-	-	0,00		1 Paket	100.000.000,00
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (UPTD KBOR)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	-	-	0,00			
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		5 Unit	532.952.720,00
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		1 Unit	45.000.000,00
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	2.619.278.989,00	2.619.278.989,00	0,00			2.113.204.484,00
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1800 laporan	1800 laporan	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00		1800 laporan	19.300.000,00
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD KBOR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 laporan	500 laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	48 laporan	156.807.000,00	156.807.000,00	0,00		48 Laporan	203.832.000,00
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KBOR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	48 laporan	81.144.000,00	81.144.000,00	0,00			
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	1.845.972.484,00	1.845.972.484,00	0,00		12 Laporan	1.890.072.484,00
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KBOR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		11 laporan	12 laporan	525.380.505,00	525.380.505,00	0,00			
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	100%	583.914.118,00	583.914.118,00	0,00			1.310.193.054,00
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	28.095.000,00	28.095.000,00	0,00		1 Unit	53.690.000,00

2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 unit	10 unit	73.884.559,00	73.884.559,00	0,00		8 Unit	142.444.118,00
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD KBOR)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	2 unit	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00			
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	50 unit	307.044.559,00	307.044.559,00	0,00		50 Unit	17.500.000,00
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	1 Unit	50.090.000,00	50.090.000,00	0,00		100 Unit	100.180.000,00
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	-	-	0,00		5 Unit	668.978.936,00
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 unit	100 unit	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00		30 Unit	327.400.000,00
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD KBOR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan		18% 348 orang	18% 348 orang	3.107.121.750,00	3.107.121.750,00	0,00			4.144.803.000,00
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		100 %	100 %	2.504.546.000,00	2.504.546.000,00	0,00			3.755.338.000,00
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		298 Orang	298 Orang	1.424.028.650,00	1.424.028.650,00	0,00			1.400.000.000,00

2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00		1 Unit	300.000.000,00
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00		5 Orang	100.500.000,00
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		1 Dokumen	1 Dokumen	18.745.000,00	18.745.000,00	0,00		1 Dokumen	204.838.000,00
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		100 Persentase	100 Persentase	122.775.000,00	122.775.000,00	0,00		100 Persentase	350.000.000,00
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		15 Orang	15 Orang	168.307.000,00	168.307.000,00	0,00		15 Orang	200.000.000,00
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		348 Orang	348 Orang	770.690.350,00	770.690.350,00	0,00		380 Orang	1.200.000.000,00
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		100%	100%	602.575.750,00	602.575.750,00	0,00			389.465.000,00

2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda				0,00	0,00	0,00		100 Persentase	0
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi		2 Organisasi	2 Organisasi	602.575.750,00	602.575.750,00	0,00		2 Organisasi	389.465.000,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional		1 % 29 medali	1 % 29 medali	24.097.233.474,10	31.097.233.474,10	7.000.000.000,00			14.959.405.000,00
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		100%	100%	133.211.500,00	133.211.500,00	0,00			2.250.000.000,00
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		7 dokumen	7 dokumen	133.211.500	133.211.500	0,00		1 dokumen	350.000.000,00
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		0 unit	0 unit	-	-	0,00		0 Unit	1.900.000.000,00
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		100%	100%	1.908.306.125,00	1.908.306.125,00	0,00			3.146.161.907,00
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		122 Orang	122 Orang	284.072.500,00	284.072.500,00	0,00		20 Orang	590.000.000,00
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (UPTD KBOR)	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00		50 Orang	2.000.000.000,00

2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		4 Kegiatan	4 Kegiatan	218.456.875,00	218.456.875,00	0,00		1 Kegiatan	150.000.000,00
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		19 Kegiatan	19 Kegiatan	1.405.776.750,00	1.405.776.750,00	0,00		2 Kegiatan	406.161.907,00
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		100%	100%	3.725.299.474,10	3.725.299.474,10	0,00			8.041.582.790,00
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		200 Orang	200 Orang	577.211.824,10	577.211.824,10	0,00		200 Orang	193.832.400,00
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00		50 Orang	20.000.000,00
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga (UPTD KBOR)	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00		50 Orang	550.000.000,00
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		7 pelatda	7 pelatda	260.150.000,00	260.150.000,00	0,00		2 Pelatda	380.000.000,00
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		4 Dokumen	4 Dokumen	13.923.400,00	13.923.400,00	0,00		1 Dokumen	130.000.000,00
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet berprestasi provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan		20 orang	20 orang	2.874.014.250,00	2.874.014.250,00	0,00		170 Orang	1.976.434.600,00
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi (UPTD KBOR)	Jumlah atlet berprestasi provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan		119 orang	119 orang	2.874.014.250,00	2.874.014.250,00	0,00		119 Orang	4.791.315.790,00

2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		100%	100%	18.330.416.375,00	25.330.416.375,00	7.000.000.000,00			1.521.660.303,00
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		4 dokumen	4 dokumen	4.330.416.375,00	4.330.416.375,00	0,00		1 Dokumen	1.480.000.000,00
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000.000,00	21.000.000.000,00	7.000.000.000,00		2 Dokumen	41.660.303,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan		5,44%	5,44%	2.100.000.000,00	3.000.000.000,00	900.000.000,00			1.238.677.000,00
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100%	100%	2.100.000.000,00	3.000.000.000,00	900.000.000,00			1.238.677.000,00
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 organisasi	1 organisasi	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1 Organisasi	10.000.000,00
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas		1 unit	0unit	100.000.000	-	-100.000.000,00		1 Unit	238.677.000,00
2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				-	-	0,00		250 Orang	990.000.000,00

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2025, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk

mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.

Perubahan Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Padang, 30 Juli 2025

**Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,**



Drs. Maifrizon, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005